



ANALISIS REKONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

MASJID

(Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh

Arif Hidayatullah

150810301145

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**ANALISIS REKONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
MASJID
(Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi
S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

**Arif Hidayatullah
150810301145**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Ibunda dan ayahanda tercinta terima kasih atas segala kasih sayang, bimbingan, nasehat, motivasi dan kerja keras yang dilakukan selama ini untuk mendidik serta do'a yang selalu menyertai perjalanan hidupku demi keberhasilan dan kesuksesanku.

Adikku tercinta yaitu Ahmad Shofi KN yang aku sayangi

Kepada saudaraku yang berada di Banyuwangi yang selalu memberikan motivasi kepada saya selama ini

Seluruh sahabat dan teman-temenku semua, terima kasih atas kebersamaannya, semoga tetap terjalin silaturahmi

Kepada teman-temenku Aliens (Wiwin, Diana, Yara, Nuzulul) dan Saudari Septa yang selalu bersama dan memberikan motivasi.

Almamaterku yang tercinta dan kubanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan, semoga kontribusi kalian dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaumnya tanpa mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(Q.S Ar-Ra'd ayat; 11)

“Selalu ada Harapan Bagi Mereka yang Sering Berdoa, Selalu Ada Jalan Bagi Mereka yang Sering Berusaha”

“Jika yang Kosong adalah Akalnya, isilah ia dengan ilmu. Jika yang kosong adalah hatinya, isilah ia dengan zikir. Kesatuan pikir dan zikir akan membentuk ulu albab”

(KH. Hasyim Muzadi)

“Bukan Kesulitan Yang Membuat Kita TAKUT, Tapi Ketakutanlah Yang Membuat Kita SULIT”

(KH. Anwar Zahid)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

(BJ Habibie)

“Menyesali nasib tidak akan merubah keadaan, Terus berkarya dan bekerja yang membuat kita BERHARGA”

(Gus Gur)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT PERNYATAAN

Nama : Arif Hidayatullah
NIM : 150810301145
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS REKONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN MASJID (STUDI KASUS PADA MASJID
AGUNG BAITURRAHMAN BANYUWANGI)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 19 juni 2017

Yang menyatakan,

Arif Hidayatullah

Nim : 150810301145



ANALISIS REKONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID
(Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh

Arif Hidayatullah

150810301145

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid
(Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)

Nama Mahasiswa : Arif hidayatullah

NIM : 150810301145

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 13 Maret 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19780927001121002

Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak
NIP. 197910142009121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA
NIP. 19640809 199003 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS REKONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
MASJID (STUDI KASUS PADA MASJID AGUNG BAITURRAHMAN
BANYUWANGI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arif Hidayatullah

NIM : 150810301145

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: 19 Juni 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Wasito, M.Si, Ak (.....)
NIP. 196001031991031001

Sekretaris : Taufik Kurrohman, S.E., M.Si, Ak (.....)
NIP. 198207232005011002

Anggota : Novi Wulandari Widiyanti, S.E., M.Acc & Fin, Ak (.....)
NIP. 195911101989021001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak. CA
NIP. 197107271995121001

ABSTRACT

The mosque is one of the non-profit oriented organizations in the field of religion in carrying out its activities, by managing its resources and resources derived from the community voluntarily and sincerely in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 45 on Nonprofit Organizations, That non-profit organizations should also and are entitled to make financial reports and report to users of financial statements. Mosques must make accurate financial statements and provide information to users of these financial statements ie the donors of the mosque. To be able to make accurate mosque financial statements required the application of accounting. Accounting is an activity undertaken untu produce sautu information system in the form of financial statements. Thus, mosques require the role of accounting as a tool for the process of managing, recording, interpreting, and reporting financial transactions that always guided by PSAK 109 and PSAK 45 set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) which will ultimately produce more transparent financial statements and Accountable.

Keywords: *Mosque, Nonprofit Organization, Accounting, Financial Statement of Mosque, PSAK 109, PSAK 45*

ABSTRAK

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba (*non profit oriented*) dalam bidang keagamaan yang dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Organisasi Nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan masjid yang akurat diperlukan penerapan akuntansi. Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berupa laporan keuangan. Dengan demikian, masjid memerlukan peranan akuntansi sebagai alat bantu untuk proses pengelolaan, pencatatan, pengitihksaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang selalu berpedoman dengan PSAK 109 dan PSAK 45 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Masjid, Organisasi Nirlaba, Akuntansi, Laporan Keuangan Masjid, PSAK 109, PSAK45

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dan tak lupa pula kita mengirim salam dan salawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul “Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)” dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Penelitian pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, guna memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk memperoleh Strata 1. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak dan Nur Hisamuddin, SE., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta penuh kesabaran untuk memberikan saran, dan bimbingan hingga selesainya laporan ini dengan baik,
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran,
4. Bapak Nur Hasan, SE selaku Bendahara umum Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi
5. Pimpinan Yayasan Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi yang sudah menyambut baik dalam penelitian ini,
6. Kepada seluruh ta'mir Masjid Agung Baiturrahman yang telah membantu selama kegiatan penelitian,

7. Kepada kedua orang tuaku, Ayahku (Tasmo) dan Ibuku tercinta (Siti Muslihatin) terima kasih atas nasehat dan jerih payah selama ini yang selalu memberikan motivasi kepada saya,
8. Adikku tercinta yaitu Ahmad Shofi KN yang aku sayangi,
9. Kepada saudaraku yang berada di Banyuwangi yang selalu memberikan motivasi kepada saya selama ini,
10. Almamaterku yang tercinta dan kubanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan, semoga kontribusi kalian dicatat sebagai amal ibadah,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari konteks sempurna karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga karya tulis ini bermanfaat positif bagi para pembaca.

Jember, 19 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah.....	8
2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah	8
2.1.3 Tujuan Akuntansi Syariah	9
2.1.4 Laporan Akuntansi Syariah	9
2.2 Pengertian Masjid	11
2.2.1 Fungsi Masjid	11
2.2.2 Aspek Keuangan Masjid.....	12

2.2.3 Pengumpulan dan Pengeluaran Dana Masjid	12
2.3 Organisasi Nirlaba	14
2.3.1 Pengertian Organisasi Nirlaba	14
2.3.2 Ciri-ciri Organisasi Nirlaba	15
2.3.3 Laporan Keuangan.....	15
2.3.4 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK 45	16
2.3.5 Jenis dan Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	19
2.4 Akuntansi Zakat/Infaq dan Shodaqoh PSAK 109	25
2.5 Penelitian Terdahulu	32
BAB 3. METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.3 Objek Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
3.7 Uji Keabsahan Data	38
BAB 4. PEMBAHASAN.....	39
4.1 Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi	39
4.1.1 Profil Masjid Agung Baiturrahman	39
4.1.2 Sejarah Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi	41
4.1.3 Susunan Pengurus Masjid Agung Baiturrahman.....	49
4.2 Proses Pengumpulan Dana oleh Masjid Agung Baiturrahman.....	72
4.3 Proses Penyaluran Dana oleh Masjid Agung Baiturrahman.....	73
4.4 Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Masjid Agung Baiturrahman... ..	76
4.5 Proses Pelaporan Keuangan Masjid Agung Berdasarkan PSAK 109.....	83
4.6 Proses Pelaporan Keuangan Masjid Agung Berdasarkan PSAK 45.....	87
4.7 Ketentuan PSAK pada Laporan Keuangan Masjid.....	88

BAB 5	PENUTUP	91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Keterbatasan Penelitian	92
5.3	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN 1	Laporan Keuangan yang dimiliki Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi	
LAMPIRAN 2	Laporan Keuangan Masjid Agung Baiturrahman Berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 45	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah ayat 282 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.”

Penggalan Surat Al Baqarah ayat 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang penting. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. (Simanjuntak, 2011). Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik) dan semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tingginya tingkat ketidak pastian dan ketidak stabilan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai organisasimemerlukan sebuah sistem perencanaan yang baik. Peranan akuntansi dalam segi pengelolaan keuangan sebuah organisasipun semakin disadari oleh berbagai pihak, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non – laba (nirlaba). Menurut Jusuf (2005) organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Walaupun organisasi semacam ini tidak mencari laba tetapi mereka tetap berurusan dengan soal-soal keuangan karena mereka mempunyai anggaran, membayar tenaga kerja, membayar listrik dan sewa, serta urusan-urusan keuangan lainnya. Disamping

itu, terdapat karakteristik khusus organisasi nirlaba dalam memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (IAI,2015). Karakteristik khusus ini menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keuangan, perlakuan akuntansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda.

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba (*non profit oriented*) dalam bidang keagamaan yang dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumberdaya yang dimilikinya dan sumberdaya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Organisasi Nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan masjid yang akurat diperlukan penerapan akuntansi. Dengan penerapan akuntansi yang baik dapat membantu dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid yang baik. (Andarsari, 2016)

Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) terdapat tiga fungsi masjid, pertama masjid sebagai ibadah (mahdlah) juga merupakan tempat untuk beribadah secara luas (Gairu Madhlah) selama dilakukan dalam batas-batas syariah. Ketika Nabi SAW. memilih masjid sebagai langkah pertama membangun masyarakat madani, konsep masjid bukanlah hanya sebagai tempat sholat, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (kabilah) tertentu, tetapi masjid sebagai majelis untuk memotivasi atau mengendalikan seluruh masyarakat (Pusat pengendalian masyarakat). Secara konseptual masjid juga disebut sebagai Rumah Allah (Baitullah) atau bahkan rumah masyarakat (bait al jami'). (<http://www.siperubahan.com/read/436/Ketika-Masjid-Membutuhkan-Sentuhan-Para-Ekonom-Syariah>). Melihat secara umum perkembangan masjid di masa sekarang, terutama dalam hal kepengurusan identik

dengan seorang Imam, muadzin, khatib, dan pengurus lain yang sering disebut juga dengan ta'mir masjid. Ta'mir biasanya adalah orang yang sudah tua dan tidak memiliki latar belakang keilmuan yang cukup untuk mengelola keuangan secara profesional. Hal ini menimbulkan persoalan ketika dana masjid yang diperoleh dari infaq atau sumbangan para donatur dikelola secara apa adanya tanpa melalui proses pencatatan keuangan yang semestinya. (Andarsari, 2014). Permasalahan lain yang seringkali muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa saja, sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam organisasi atau lembaga publik, swasta maupun lembaga keagamaan. Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. Padahal transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan laporan keuangan entitas nirlaba (masjid). Dengan keterbukaan, akuntabilitas atas laporan keuangan masjid maka akan berdampak positif kepada para *stakeholders* atau masyarakat sekitar terhadap pengelolaan dan manajemen keuangan masjid. Namun kenyataannya masih banyak penerapan laporan keuangan di lembaga masjid yang masih belum menerapkan transparansi, akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi perhatian khusus dalam kajian praktik ini. (Wijangsongko, 2014)

Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba (*non profit oriented*) harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan segala informasinya karena menyangkut kepentingan publik. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas tentang pengelolaan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan masjid yang baik. Maka dari itu

diperlukan tenaga pengelola keuangan masjid yang benar-benar amanah, mengetahui tentang praktik keuangan (akuntansi), serta mampu mempertanggungjawabkan informasi. Hal ini dapat meminimalisir kesenjangan informasi keuangan antara lembaga masjid dengan masyarakat publik sebagai penaman sumber dananya. (Andikawati, 2014)

Sumber dana yang diperoleh oleh masjid dapat berasal dari kotak amal masjid, donasi, zakat, infak dan shodaqoh dari masyarakat. Dari sumber dana tersebut pengelola keuangan masjid yaitu ta'mir seharusnya dapat menyajikan laporan keuangan masjid dengan baik dan mampu menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. Karena biasanya yang kita ketahui laporan keuangan masjid hanya disajikan setiap satu minggu sekali pada saat sholat jumat. Maka dari itu pengurus masjid diharapkan mampu melaporkan informasi keuangan masjid secara terbuka kepada publik sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan masyarakat merasa puas atas pengelolaan keuangan masjid tersebut. Oleh karena itu dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan kepada pengelola/pengurus masjid untuk mampu mempublikasikan transparansi dana dan penyusunan laporan keuangannya. Dengan adanya transparansi dana dan pengelolaan keuangan masjid maka akan memberikan ketenangan kepada masyarakat dan percaya ketika akan menyumbangkan uangnya atau dananya. (Andikawati, 2014)

Pengelolaan keuangan masjid merupakan hal yang sangat viral untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mempunyai peranan yang sangat penting dengan menerbitkan PSAK 109 dan PSAK 45. PSAK 109 sendiri mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, shodaqoh yang biasanya ini merupakan sumber dana utama bagi masjid. Sedangkan PSAK 45 mengatur tentang pelaporan keuangan khususnya untuk organisasi nirlaba salah satunya masjid. Organisasi nirlaba ini mendapat sumber dananya berasal dari dana hibah, donasi, infaq shodaqoh dari masyarakat umum yang memberikan dananya. Selain itu organisasi nirlaba ini juga menjalankan aktivitasnya tanpa mengharapkan

laba (non profit oriented) dan semata-mata hanya untuk kepentingan lembaga tersebut (masjid).

Berdasarkan survey awal pada yang telah dilakukan oleh peneliti tanggal 21 April 2017, bahwa masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi merupakan masjid yang dikelola secara modern sebagaimana masjid-masjid dibanyak kota pada umumnya. Disamping itu Masjid Agung Baiturrahman sering kali mendapat penghargaan sebagai Masjid percontohan tingkat Nasional maupun Provinsi karena pengelolaannya yang baik. Sumber keuangan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat setempat dan jama'ah dalam bentuk infaq. Pelaporan keuangan diumumkan melalui mimbar jum'at dan terkait pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan rasa kepercayaan sesama pengurus (takmir) masjid. Namun baik dalam hal penyusunan laporan keuangan masjid, pengurus (takmir) atau bendahara masjid belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 terkait dengan organisasi Nirlaba.

Dari uraian tersebut betapa pentingnya suatu akuntansi masjid yang transparan dan akuntabel sehingga perlu dilakukan penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan masjid yang baik. Maka dari itu penulis mencoba merekonstruksi penerapan PSAK 109 dan PSAK 45 dalam laporan keuangan masjid yang ada kabupaten dibanyuwangi. Oleh karena itu penulis mengangkat tema dalam penelitian ini dengan judul **“ANALISIS REKONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi)”**. Judul yang penulis ambil sesuai dengan objek penelitian dan penulis berharap semoga dapat membantu pihak pengelola masjid (ta'mir) dalam melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan masjid dengan baik sehingga akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi keuangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana laporan keuangan pada lembaga masjid di Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi?
2. Bagaimana rekonstruksi penyusunan laporan keuangan masjid ke dalam PSAK 109 dan PSAK 45?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan laporan keuangan yang ada pada masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi.
2. Merekonstruksi laporan keuangan masjid sesuai dengan yang diterapkan PSAK 109 dan PSAK 45.
- 3.

1.4 Manfaat Penelitian

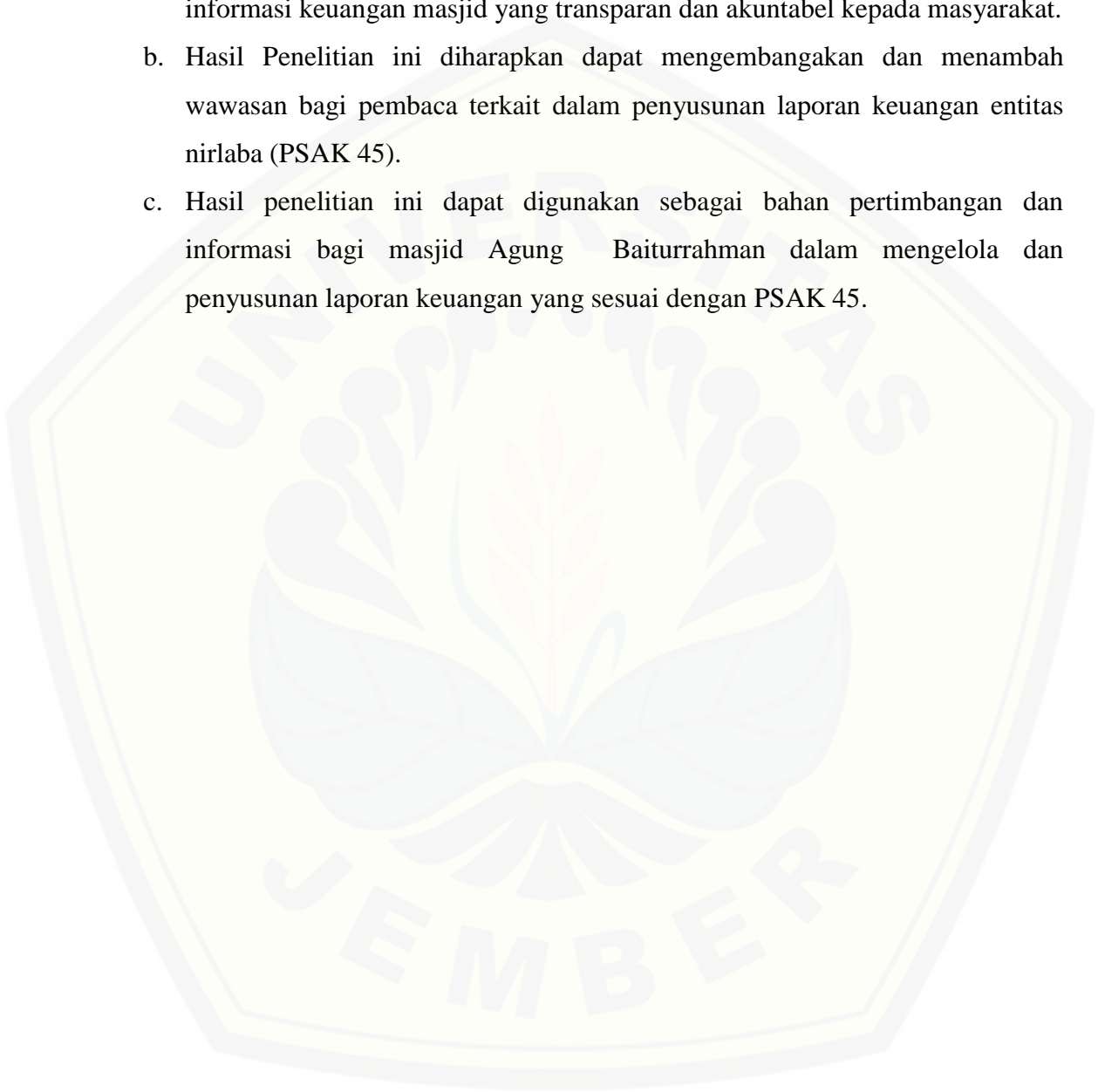
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan terkait rekonstruksi penyusunan laporan keuangan nirlaba (PSAK 45) bagi pengurus (takmir) atau bendahara masjid dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid, khususnya sumber dana yang diperoleh oleh masjid. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa pertanggungjawaban yang utama adalah kepada Allah SWT serta kepada manusia dan alam.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bagi lembaga masjid diharapkan mampu memberikan informasi keuangan masjid yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan bagi pembaca terkait dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba (PSAK 45).
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi masjid Agung Baiturrahman dalam mengelola dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut wahyudi (2010) akuntansi syariah didasarkan pada filosofi islam yang tertuang dalam Al Qur'an dan Hadist dan telah berhasil diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam era kepemimpinannya dan berhasil menciptakan masyarakat sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Perbedaan antara akuntansi islam dan konvensional pasti ada karena keduanya memiliki dasar filosofi yang berbeda. Islam memiliki *worldview* (pandangan) yang dibimbing Allah SWT sedangkan kapitalis membawa *worldview* yang didasarkan pada pemikiran manusia yang dikuasai rasio dan nafsu yang biasanya dikendalikan oleh syetan atau dalam terminologi Al Qur'an disebut "*thoghut*". Jadi, Akuntansi syariah merupakan elemen yang harus dapat mewujudkan sistem ekonomi islam yang adil, jujur, dan kekayaan tidak menumpuk pada satu pihak saja, tidak merusak alam, akidah dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi harus bisa menciptakan ekonomi yang adil dan islam yang rahmatan lil alamin.

Pengembangan akuntansi syariah dikembangkan berdasar kepercayaan masyarakat muslim. Secara nyata dasar-dasar paradigma syariah ditujukan dari tiga (3) sumber yaitu Al Qur'an, Al Hadist, dan Fiqih. Sumber-sumber tersebuturut secara hirarki tidak dapat mendahului satu terhadap yang lainnya, sumber yang pertama Al Qur'an kemudian diikuti oleh hadist, kemudian fiqih (Prasetyo, 2010)

2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip umum syariah (Riansyah, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*) dan Berpegang pada amanah (fungsi ke-Khalifahan)

Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang diberikan. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak.

3. Prinsip Kebenaran (*Truth*)

Suatu prinsip dimana suatu keadilan ditegakkan dan berdasarkan dengan kejadian yang sebenarnya. Contoh, dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik bila dilandaskan pada nilai kebenaran.

2.1.3 Tujuan Akuntansi Syariah

Dengan memperhatikan konsep tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai dalam Al Qur'an serta yang dipraktikkan oleh rasulullah SAW maka kita rumuskan tujuan akuntansi syariah (Harahap, 2008:105) yaitu:

“membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggung jawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah SWT dalam menjalankan suatu organisasi dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah SWT dan pemberi amanah sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan diridhoi Allah SWT serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan akhir dan utama “al-falah” yaitu memasuki surga Janatun Naim.

2.1.4 Laporan Akuntansi Syariah

Laporan Akuntansi syariah bukan laporan keuangan syariah karena dalam postulat akuntansi syariah sudah menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah ini tidak hanya laporan keuangan tetapi juga laporan (informasi) non keuangan. Jenis-jenis laporan akuntansi syariah sebagai berikut:

a. Laporan Syariah

Laporan syariah ini memberikan informasi sejauh mana entitas yang dilaporkan sesuai dengan syariah. Baik syariah dalam arti syariat islam yang ada dalam Al Qur'an, Hadist, Hukum, Fiqih, fatwa dewan syariah nasional, ketentuan asosiasi, regulator, direksi, komisasris dan standar prosedur lainnya. Laporan ini terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Syariah

Laporan ini bukan saja tentang pelaksanaan syariah dalam proses produksi dan jasa tetapi juga pelaksanaan syariah dalam menjalankan manajemen operasionalnya entitas sehari-hari.

2. Indeks Pelaksanaan Syariah

Dengan adanya indeks ini maka diharapkan entitas akan berupaya dan bersaing terus-menerus untuk meningkatkan kesesuaian semua aktivitasnya dengan syariah. Baik kesesuaian dengan fatwa yang ditetapkan majelis ulama, regulator, standar akuntansi dan sebagainya.

b. Laporan Komitmen Sosial

Laporan ini berisi berbagai informasi atau laporan yang berisi sejauh mana entitas melakukan komitmennya terhadap masyarakat. Laporan ini misalnya terdiri dari:

1. Laporan Sosial Ekonomi

2. Laporan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf

3. Laporan Qordul Hasan

4. Disclousure pertanggungjawaban sosial perusahaan. Berupa pengungkapan dalam berbagai bentuk yang menyangkut CSR.

c. Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini hampir sama dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akungansi kapitalis. Adapun laporan keuangan yang dimaksudkan disini adalah:

1. Neraca
2. Laporan Nilai Tambah
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Sumber Daya Manusia
5. Laporan Investasi Terikat
6. Laporan Komitmen dan Kontinjensi
7. Laporan Perubahan Ekuitas
8. Catatan dan Penjelasan Laporan Keuangan
9. Lampiran-lampiran

2.2 Pengertian Masjid

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan.

Masjid berasal dari kata *sajada* – *yasjudu* – *sujudan wa masjidan*, artinya patuh, taat, dan tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Jadi masjid artinya tempat sujud karena ia berkedudukan sebagai *isim makan* (nama tempat), yang dimaksud tempat sujud adalah tempat meletakkan jidat pada bumi. Oleh karena itu kata Quraish Shihab (2007:606), itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dinamai masjid, karena ia sebagai tempat meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi ketika melakukan sujud.

2.2.1 Fungsi Masjid

Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) seperti yang dikutip harian Republika ada tiga fungsi masjid yaitu :

1. Masjid dapat difungsikan sebagai pusat ibadah, baik ibadah mahdhah, maupun ibadah sosial. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung kepada Allah SWT, seperti sholat, mengaji dan lainnya. Tentu, secara tidak langsung,

ibadah-ibadah tersebut juga ada hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan sebagai pusat ibadah sosial, masjid dapat difungsikan untuk mengelola zakat, wakaf, membangun ukhuwah Islamiyah, menjaga kebersihan dan kesehatan bersama, melaksanakan kurban, dan membantu peningkatan ekonomi umat.

2. Memanfaatkan Masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat, melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid, seperti khutbah, pengajian, kursus ketrampilan yang dibutuhkan anggota jamaah, dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Membina persatuan umat. (Chaniago, "Tingkatkan Peran Ubudiyah Masjid", *Republika*. 4 Maret 2014).

2.2.2 Aspek Keuangan Masjid

Salah satu aspek penting keberlangsungan pengelolaan masjid yang baik adalah adanya dana untuk operasional masjid, sebab masjid tidak hanya untuk dibangun tapi juga perlu dana untuk menopang kegiatan masjid (Zulkarnain, 2015). Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para pengurus (takmir) masjid untuk memikirkan dan mencari dana untuk kemakmuran masjid (Ayub *et al*, 2005:57). Masjid adalah lembaga publik yang sumber dananya berasal dari masyarakat. Untuk itu, pengurus masjid harus melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana masjid, agar jamaah semakin percaya bahwa dana mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan masjid (Yani, 2009:162).

2.2.3 Pengumpulan dan Pengeluaran Dana Masjid

Masjid merupakan organisasi nirlaba yang memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya setiap bulan. Biaya itu dikeluarkan untuk mendanai kegiatan rutin, mengurus masjid, memelihara dan merawatnya. Kegiatan masjid tentu terlaksana dengan baik jika tersedia dana dalam jumlah yang mencukupi. Tanpa ketersediaan dana, maka semua gagasan memakmurkan masjid tidak dapat dilaksanakan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012) memaparkan bahwa dalam pendanaannya organisasi nirlaba

memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan.

Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqof dan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biaya rutin (listrik,air), biaya kebersihan,biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam Maulid Nabi SAW, Ramadhan, dan lain sebagainya. Dalam mempertanggungjawabkan sumber pendapatan dan pengeluaran tersebut pengurus (takmir) masjid dituntut untuk mencatat, menyusun dan mengelola keuangan tersebut dengan baik, kemampuan pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu bentuk bahwa pengurus (takmir) masjid merupakan orang yang amanah dan bertanggung jawab. Selain itu sebagaimana yang dipaparkan oleh Kurniasari (2009) bahwa pengelolaan keuangan masjid yang baik merupakan faktor utama dalam upaya menjaga keberlangsungan dan kemakmuran masjid.

Dalam Pengelolaan keuangan dan sumber daya masjid harus memenuhi tigakriteria yakni: efisien, efektif dan bertanggung jawab (Pralebda, 2013). Kriteria pertama, efisien. Efisien mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan masjid harus sehemat mungkin. Termasuk dari sikap efisien pengurus masjid adalah dengan menggunakan atau membelanjakan dana masjid untuk kebutuhan dan kegiatan-kegiatan sosial masjid yang memang telah dianggarkan sebelumnya.

Kriteria kedua adalah efektif. Efektif adalah sikap yang menggunakan sumber daya masjid seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. contoh dari sikap efektif pengurus masjid adalah dengan memperhatikan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada, misalnya saja pendingin ruangan, hal tersebut dilakukan guna menunjang kenyamanan para jamaah dalam beribadah.

Kriteria ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam konteks ini adalah kemampuan pengurus masjid dalam memberikan pertanggungjawaban

kepada jamaah mengenai segala aktivitas yang telah dilakukan. Pengurus masjid harus mampu mempertanggungjawabkan khususnya dalam hal keuangan, dengan mencatat, menyusun dan melaporkan segala aspek informasi mengenai aktifitas maupun keuangan yang memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat bahwa pertanggungjawaban bukan hanya sebatas kepada sesama ataupun alam, melainkan pertanggungjawaban yang utama adalah kepada Allah SWT.

2.3 Organisasi Nirlaba

2.3.1 Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok kepada publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian not-for-profit juga harus diartikan sebagai not-for-loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut. Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis dan lain-lain.

Tujuan utama organisasi nirlaba adalah menyediakan jasa kepada masyarakat sekitarnya dan bukan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. sedangkan tujuan utama laporan keuangan nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba (PSAK 45 ER 2015)

2.3.2 Ciri-ciri Organisasi Nirlaba

Ciri-ciri organisasi nirlaba adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

2.3.3 Laporan Keuangan

Menurut Baridwan, dalam buku *Intermediate Accounting* (2008:17), ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan segala informasi keuangan kepada stakeholders.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. (IAI, 2015)

Dalil Laporan keuangan:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah sebagai pengawas atas persaksian itu”. (An Nisa : 6)

IAI (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

IAI (2015) menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas organisasi yang bermanfaat bagi seberapa besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawabam manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalil Laporan Keuangan secara jujur dan benar dalam Surat An Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi-saksi, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*. (An Nisa : 135)

2.3.4 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK 45

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian *not-for-profit* juga harus diartikan *not-for-loss*. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan

kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut.

Dalam hal kepemilikan, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali sebagaimana pada organisasi bisnis. Selain itu, kedua jenis organisasi tersebut berbeda dalam hal cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain, yang idealnya, tidak mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan.

Lebih lanjut, walaupun tidak meminta adanya pengembalian, namun para donatur sebagai salah satu *stakeholder* utama organisasi nirlaba tentunya mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan yang mereka berikan. Para donatur ini, baik mempersyaratkan atau tidak, tentu tetap menginginkan pelaporan serta pertanggungjawaban yang transparan atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk memberi manfaat bagi kepentingan publik.

Untuk itu, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yang lingkungannya masih kecil serta sumber dayanya masih belu memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya. Akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum.

Menurut PSAK No 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya empat (4) jenis laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode laporan
- b. Laporan Aktivitas untuk suatu periode pelaporan

- c. Laporan Arus Kas untuk suatu periode pelaporan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba mirip dengan organisasi bisnis, kecuali pada 3 hal utama, yaitu:

- a. Komponen laporan posisi keuangan organisasi nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis.
- b. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi sentral dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola oleh organisasi nirlaba.
- c. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun.

Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Aset neto tersebut terdiri dari tiga jenis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapaun bila sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- b. Aset neto terikat temporer adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu sendiri (misal: untuk melakukan ekspansi, atau untuk membeli aset tertentu).

- c. Aset neto terikat permanen adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian, organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Contoh aset jenis ini adalah dana abadi, warisan, maupun waqaf.

Meski PSAK No 45 didedikasikan bagi organisasi nirlaba, namun standar ini juga dapat ditetapkan oleh lembaga pemerintah, dan uni-unit sejenis lainnya. Namun perlu dicatat bahwa penerapan pada organisasi selain nirlaba tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.5 Jenis dan Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi (1) laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, (2) laporan aktivitas, (3) laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan (4) catatan atas laporan keuangan.

2.3.5.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Di dalam akuntansi keuangan neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet atau statement of financial position*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal.

Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup:

1. Aset

- a. Kas dan setara kas; bila ada kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang maka hal ini harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.
- b. Piutang (piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain)
- c. Persediaan
- d. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka
- e. Surat berharga
- f. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Bila dilihat dari susunan tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian aset pada laporan posisi keuangan suatu organisasi nirlaba juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya-kemampuan suatu aset untuk dengan mudah dikonversi menjadi kas.

2. Liabilitas

- a. Utang dagang
- b. Pendapatan diterima dimuka
- c. Utang jangka panjang

Dalam penyajiannya, liabilitas tetap diurutkan berdasarkan masa jatuh temponya.

3. Aset bersih

- a. Aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi.
- b. Aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan, ataupun keduanya. Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku terhadap: sumbangan berupa aktivitas operasi

tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau pemerolehan aset tetap. Informasi mengenai pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

- c. Aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap aset, seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.3.5.2 Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan perubahan jumlah aset neto selama suatu periode, dimana perubahan tersebut terjadi karena aktivitas yang terjadi pada entitas nirlaba tersebut.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu pendapatan, beban, *gains and losses*, reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para *stakeholders* untuk:

- a. Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode.
- b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan

- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang.
- b. Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat.
- c. Sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan.
- d. Jika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
- e. Keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban) lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
- f. Selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya, organisasi nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan. Klasifikasi ini bisa dilakukan menurut kelompok operasi atau non-operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain yang sesuai dengan aktivitas organisasi.

Lebih lanjut, komponen dalam laporan aktivitas mencakup:

- 1) Pendapatan

Pendapatan dalam Lembaga Nirlaba berdasarkan PSAk 45 meliputi: sumbangan, Jasa layanann, penghasilan investasi.

Semua pendapatan tersebut disajikan secara bruto. Namun, khusus untuk pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen lain yang juga disajikan dalam jumlah neto adalah keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain

yang berada di luar pengendalian organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

2) Beban

- a. Beban terkait program pemberian jasa. Aktivitas terkait dengan beban jenis ini antara lain aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi.
- b. Beban terkait aktivitas pendukung (meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa). Umumnya, aktivitas pendukung mencakup:
 - 1) Aktivitas manajemen dan umum, meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya.
 - 2) Aktivitas pencarian dana, meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah dan lain-lain.
 - 3) Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

Perlu dicermati bahwa laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi ini bermanfaat untuk membantu para *stakeholders* dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.

2.3.5.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.

Menurut PSAK No 2 (revisi 2015) Arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba, sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung (*direct method*) maupun metode tidak langsung (*indirect method*).

Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah. Lebih lanjut, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*), atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

Sementara itu, ada kalanya organisasi nirlaba melakukan transaksi yang mengakibatkan perubahan pada komponen posisi keuangan, namun perubahan tersebut tidak mengakibatkan kas. Misalnya, adanya pembelian kendaraan

operasional dengan utang, sumbangan berupa bangunan atau aset investasi lainnya. Transaksi sejenis ini (yang tidak mengakibatkan adanya perubahan kas) harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2.3.5.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

2.4 Akuntansi Zakat/Infaq dan Shodaqoh (PSAK 109)

a. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/shodaqoh.

b. Ruang lingkup

PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh.

PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

c. Definisi-definisi Khusus

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq/shodaqoh.

2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/shodaqoh serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infaq/shodaqoh adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/shodaqoh.
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
5. Infaq/ Shodaqoh adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

d. Karakteristik

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun tidak periodik) tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Infaq shodaqoh merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/shodaqoh.

Zakat dan infaq/shodaqoh yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

e. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atas pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyalur Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

f. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Shodaqoh

1. Pengakuan awal

Infaq/Shodaqoh yang diterima diakui sebagai dana infaq/shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shodaqoh sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infaq/Shodaqoh yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shodaqoh untuk bagian penerima infaq/shodaqoh. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shodaqoh ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Infaq/Shodaqoh yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shodaqoh. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shodaqoh terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomis panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infaq/shodaqoh tidak lancar diakui sebagai:

- a) Pengurang dan infaq/shodaqoh, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.

- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infaq/shodaqoh dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infaq/shodaqoh sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shodaqoh.

3. Penyaluran infaq/shodaqoh

Penyaluran dana infaq/shodaqoh diakui sebagai pengurang dana infaq/shodaqoh sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk nonkas.

Penyaluran infaq/shodaqoh kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shodaqoh sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shodaqoh yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq/shodaqoh kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shodaqoh bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shodaqoh.

g. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shodaqoh dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

h. Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infaq/Shodaqoh

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penerimaan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Infaq/Shodaqoh

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shodaqoh, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shodaqoh berupa aset nonkas.
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq/shodaqoh, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c) Kebijakan penyaluran infaq/shodaqoh, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.

- d) Keberadaan dana infaq/shodaqoh yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari sejumlah penerimaan infaq/shodaqoh selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infaq/shodaqoh menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/shodaqoh serta alasannya.
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/shodaqoh yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/shodaqoh.
- h) Rincian dana infaq/shodaqoh berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/shodaqoh yang meliputi:
 - 1. Sifat hubungan istimewa
 - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periodeSelain membuat pengungkapan tersebut diatas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
 - a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan
 - b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/shodaqoh.
- i. Komponen Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian Andikawati (2014) yang berjudul mengenai “Laporan Keuangan Lembaga Masjid” studi kasus di Agung Anz Mahfudz Lumajang. Dengan memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Bentuk laporan masjid Agung Anaz Machfud dan masjid al – huda masih sederhana dan laporannya kurang sesuai sebagaimana ditentukan dalam PSAK 45 dan PSAK 109.
2. Laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 lebih cenderung bisa diterapkan daripada PSAK 45 mengingat laporan keuangannya lebih bisa dipahami dan dimengerti karena akun – akun yang terdapat dalam laporan keuangan sederhana masjid hampir sama dengan akun- akun yang terdapat pada PSAK 109.
3. PSAK 45 cenderung lebih sulit diterapkan karena ta'mir masjid yang tidak memiliki basic akuntansi akan mengalami kesulitan dalam hal pengolongan akun –akun mana saja yang lebih sesuai untuk digolongkan ke dalam akun – akun yang ada di PSAK 45.
4. Faktor – faktor yang menjadi penghambat penerapan PSAK 109 pada masjid – masjid di Lumajang ini diantaranya :
 - a. Fokus pencarian dana lebih diprioritaskan
 - b. Kurang efektifnya pengelolaan masjid
 - c. Sumber Daya manusia dibidang akuntansi kurang.
 - d. Pencatatan laporan keuangan masjid belum berpedoman PSAK 109.

Dalam penelitian Purnama (2015) yang berjudul “Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Pada Masjid” studi kasus pada masjid AT-TAQWA Bondowoso dengan memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik.
2. Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mendapatkan profit/laba. Dalam organisasi banyak sekali dana yang terkumpul dari sekian banyaknya penyumbang yang disalurkan untuk berbagai kegiatan didalam masjid. Mengingatnya banyak aliran dana yang ada di masjid, maka perlu adanya laporan keuangan yang efektif dan relevan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun dalam hal ini masjid hanya membuat laporan keuangan sederhana. Maka dari itu peneliti mengkonstruksi laporan keuangan sederhana menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria PSAK 45 dan PSAK 109 mengingat masjid mempunyai ciri-ciri kecocokan dengan PSAK tersebut.
3. Setelah menganalisis laporan keuangan sederhana masjid, laporan keuangan 109 lebih cocok untuk diterapkan, dikarenakan PSAK 109 lebih mudah dipahami. Yang dimaksud lebih mudah dipahami hal ini mengenai akun-akun PSAK 109 hampir sama dengan laporan keuangan sederhana.

Dalam Penelitian Andarsari (2016) yang berjudul “Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Lembaga Masjid” dengan memperoleh kesimpulan:

Lembaga masjid merupakan organisasi nirlaba yang banyak menghadapi kendala dalam pelaporan keuangannya. Meski bentuknya adalah organisasi nirlaba tetapi PSAK 45 menyatakan bahwa organisasi nirlaba memiliki hak dan harus membuat laporan keuangan. Lembaga masjid dalam pengelolaan keuangannya membutuhkan penerapan akuntansi yang baik sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap para donatur dan masyarakat sekitar yang menjadi jamaah masjid. Laporan yang terstruktur seperti diatur dalam PSAK 45 dapat dijadikan pendaun untuk

menyusun laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan akuntabel dan lebih transparan. Hal ini juga menjadi jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat yang bertanya-tanya tentang laporan keuangan masjid yang selama ini biasanya pencatatannya sangat sederhana dan tidak detail



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan di Majelis Agung Baiturrahman di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci (Nur Indriantoro 2002:12)

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sistem penyusunan laporan keuangan di Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi dan untuk mengetahui serta memahami siklus akuntansi disana. Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni Masjid yang telah dipilih oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran secara utuh.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan metode studi kasus yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (Danim, 2002: 55). Pengamatan dilakukan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus dibatasi dan difokuskan pada suatu hal tertentu agar penelitian yang dilakukan tepat sesuai tujuan. Peneliti ini memfokuskan pada masalah penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada Masjid Agung Baiturrahman, yang secara khusus merupakan tempat peribadatan terletak di jalan Jendral Sudirman 137 Banyuwangi Jawa Timur, dengan memberikan pelayanan yang baik dan nyaman berupa fasilitas, sarana dan prasarana bagi ummat muslim untuk beribadah serta untuk kegiatan sosial lainnya seperti: Kantin, TPQ, RA (TK), MA yang berlandaskan nilai-nilai syariah (islam).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis primer dan sekunder yang diambil dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada pengurus/ pengelola masjid atau yang biasa disebut ta'mir masjid dan juga bendahara masjid dan untuk data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat di Masjid Agung Baiturrahman tahun 2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Indriantoro dan Supomo(2009:146).

Teknik ini dilakukan melalui :

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian. wawancara dapat dilakukan langsung kepada pengurus/ pengelola masjid atau yang biasa disebut ta'mir masjid dan juga bendahara masjid.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder (Indriantoro dan Supomo (2009:147) adalah data yang diperoleh baik yang belum di olah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Untuk data sekunder diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat di Masjid Agung Baiturrahman tahun 2016.

3.6 Teknik Analisis Data

Data ini diperoleh dari lembaga masjid di Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Setelah data-data diperoleh maka selanjutnya akan diolah kemudian dilakukan analisa. Analisa data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengolah data primer atau sekunder, yang bermanfaat bagi peneliti guna mencapai tujuan akhir penelitian. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian ditandingkan dengan standart yang ada pada saat ini selanjutnya dideskripsikan bagaimana laporan keuangan di lembaga masjid kaitannya dengan bagaimana laporan keuangan lembaga masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 yang meliputi analisa terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporannya.

Analisa data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak yang terkait kemudian dikembangkan dari analisa berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Langkah-langkah analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Menganalisa tentang laporan keuangan yang terjadi pada lembaga masjid saat muzzaki memberikan zakat, infak/shodaqoh kepada mustahiq, dan dana yang dimiliki oleh lembaga masjid dipergunakan untuk keperluan apa saja.
2. Merekonstruksi laporan keuangan masjid dalam hal penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109.

3.7 Uji Keabsahan Data

Di dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan realibilitas (dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan valid terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validityas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya dilakukan pengujian kredibilitas data tau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi adalah merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data yang telah ada(Sugiyono, 2014) Tringaluasi dapat dilakukan menggunakan tekhnik yang berbeda yaitu wawancara dan dokumen .

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat kita tarik dua kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah bahwa Masjid Agung Baiturrahman telah melakukan pelaporan keuangan yang lumayan baik yaitu: pertama, dengan adanya pembagian tugas atau *job description* setiap pengurus seperti bendahara 1, bendahara 2, dan bendahara 3. Kedua, laporan yang dibuat oleh bendahara sudah tersistem yaitu dengan menggunakan excel dan program full timer. Ketiga, masjid agung baiturrahman sudah menerapkan kode rekening berdasarkan kegiatan yang dialami. Keempat, dengan diterapkannya kode rekening tersebut maka ada pemisahan dalam pengeluaran kasseperti pengajian hajat. Kelima, dengan adanya pemasukan-pemasukan dari berbagai sumber maka bendahara umum membuatkan buku pembantu supaya mempermudah dalam melakukan rekapitulasi.

Kesimpulan kedua adalah Masjid merupakan suatu organisasi nirlaba yang mana dalam organisasi tersebut banyak sumber dana yang masuk dari berbagai pihak, banyaknya sumber dana yang terkumpul digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di Masjid. Dengan banyaknya kegiatan yang ada di Masjid Agung Baiturrahman maka perlu dibuatkan laporan keuangan yang lebih terstruktur guna mempermudah dalam mempertanggung jawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Oleh karena itu peneliti mencoba merekonstruksi laporan keuangan Masjid sesuai dengan peraturan PSAK 109 dan PSAK 45 yang dapat dijadikan panduan untuk menyusun laporan keuangan Masjid yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan disusunnya laporan keuangan Masjid yang lebih transparan yaitu sesuai dengan PSAK maka akan memberi kepercayaan atas pengelolaan keuangan tersebut kepada para donatur.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sadar masih banyak keterbatasan yang dihadapi. Pertama tentang penguasaan teori dalam wawancara yang kurang aktif sehingga peneliti banyak melakukan wawancara beberapa kali untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kedua peneliti hanya meneliti satu Masjid saja sehingga hanya menggambarkan satu ruang, waktu, keadaan, dan situasi yang sempit sehingga sulit untuk membandingkan. Ketiga, dengan jangka waktu yang dimiliki narasumber dari Masjid Agung tersebut sangat terbatas karena tidak selalu berada di Masjid, maka wawancara dengan pihak Bendahara hanya berlangsung maksimal 30 menit. Keempat, keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti yaitu pihak pimpinan yayasan yang tidak mengizinkan untuk memperlihatkan laporan keuangannya, jadi peneliti hanya melihat format laporan keuangannya saja.


Dan yang terakhir, karena garis besar penelitian ini hanya membahas tentang rekonstruksi penyusunan laporan keuangan masjid yang berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 45, dengan pihak narasumber yang kurang terlalu faham tentang PSAK. Sehingga kemampuan peneliti untuk menjelaskan bagian laporan keuangan masjid yang berdasarkan PSAK juga kurang optimal.

5.3 Saran

Terkait dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, maka peneliti yang selanjutnya seharusnya dapat lebih banyak melibatkan objek yang diteliti sehingga mudah dalam membandingkan. Kemudian peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi, baik dari segi wawancara maupun dengan referensi yang banyak sehingga memudahkan dalam mengembangkan ide penelitian. Dan yang terakhir, peneliti harus memahami tentang laporan keuangan masjid yang berdasarkan PSAK 109 dan 45 sebelum melakukan penelitian sehingga masjid yang dijadikan objek penelitian dapat dijelaskan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Pipit Rosita Andasari. 2016. Laporan keuangan organisasi nirlaba. Jurnal ekonomi universitas kediri. Vol. 1, No. 2, Hal. 143-152
- Lingga Jenar Wijasangko. 2014. Implementasi akuntansi dalam organisasi keagamaan. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional JATIM. Vol. 1, No. 3
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. PSAK No. 45 , No. 109. Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Whedy. 2010. Kajian Karakter Akuntansi Syariah: Dulu, Kini, dan Esok. Jurnal Universitas Jember. Vol. 2. No. 2
- Adi Purnama, Yusuf. 2015. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan. Jurnal Universitas Muhamadiyah Jember. Vol 1. No. 2.
- Andikawati, Desy. 2014. Laporan Keuangan Masjid. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 2. No. 2
- Hanafi, Roby. 2015. Akuntabilitas dan Pengelolaan keuangan Masjid. Jurnal Universitas Muhamadiyah Surakarta. Vol. 1, No. 2
- Dahnil Anzar Simanjuntak. 2011. Akuntabilitas Keuangan di Masjid. SNA 7
- Wahyudi, Ilham. 2010. *Akuntansi Syariah, Sebuah Refleksi Budaya Islam*
Dewan Masjid Indonesia. 2012
- <http://www.siperubahan.com/read/436/Ketika-Masjid-Membutuhkan-Sentuhan-Para-Ekonom-Syariah>
- <https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/11/tafsir-surat-nisa-4-ayat-6.html>
- <http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135>
- <http://tafsirq.com/4-al-baqarah-282>



Lampiran 1
Laporan Keuangan
yang dimiliki Masjid
Agung Baiturrahman
Banyuwangi



Lampiran 2
Laporan Keuangan
Masjid Agung
Baiturrahman
Berdasarkan PSAK 109
dan 45

Lampiran 2

Laporan Keuangan Masjid Agung Baiturrahman Berdasarkan PSAK 109

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dalam format neraca berdasarkan PSAK 109 terdapat perbedaan pada nilai sisi Pasiva, yaitu dalam PSAK 109 tidak terdapat saldo dana dan penerimaan dana lain-lain. Karena penulis menyesuaikan kondisi Masjid Agung Baiturrahman yang tidak memiliki saldo dana.

Laporan Posisi Keuangan
Masjid Agung Baiturrahman
Per 31

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Aset		Kewajiban Jangka Pendek:	
Aset Lancar:		Utang Biaya:	
Bank Jatim	Rp xxx	Biaya Banner Buletin	Rp xxx
Bank BNI	Rp xxx	Biaya Cetak Fotocopy	Rp xxx
Bank BRI	Rp xxx	Pembelian Barang Bangunan	Rp xxx
Bank Mandiri Syariah	Rp xxx		
Bank Mandiri	Rp xxx	Jumlah Kewajiban	Rp xxx
Bank BNI Syariah	Rp xxx		
Bank BNI Syariah	Rp xxx		
Bank Muamalat	Rp xxx		
Shodaqoh Masyarakat	Rp xxx		
Pedagang & Masy. Pasar oleh Paguyuban Joko Tole	Rp xxx		
Jasa Tabungan/Deposito	Rp xxx		
Shodaqoh Instansi Vertikal/Polres	Rp xxx		
Shodaqoh Perusahaan Swasta	Rp xxx		
Kotak Jariah Jumat	Rp xxx	Saldo Dana	
Kotak Tabungan Akherat	Rp xxx	(Tidak Terdapat Saldo Dana)	
Shodaqoh Jamaah Ad Dhuha	Rp xxx		
Infaq Pendidikan TK Baiturrahman	Rp xxx		
Infaq Pendidikan TPQ Baiturrahman	Rp xxx		
Shodaqoh Jamaah Hajat	Rp xxx		

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Hasil Wakaf	Rp xxx		
Perlengkapan	Rp xxx		
Jumlah Aset Lancar	Rp xxx		
Aset Tetap:			
Masjid	Rp xxx		
Peralatan	Rp xxx		
Inventaris	Rp xxx		
Jumlah Aktiva	Rp xxx	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp xxx

Laporan Perubahan Dana

Dalam format Laporan Perubahan Dana berdasarkan PSAK 109 terdapat perbedaan yaitu terdapat tambahan beberapa akun, yaitu dana wakaf serta penerimaan lain-lain. Penambahan akun ini disesuaikan berdasarkan program yang dimiliki oleh Masjid Agung Baiturrahman.

Selain itu tidak terdapat akun zakat, karena program zakat ada bagiannya sendiri dan tidak masuk dalam laporan keuangan masjid. Di dalam Laporan Perubahan Dana ini mencatat semua akun-akun dan rincian penerimaan dan nantinya akan menjadi saldo akhir.

Laporan Perubahan Dana
Masjid Agung Baiturrahman
Per 31

Keterangan	Jumlah
Penerimaan Dana:	
Shodaqoh Masyarakat	Rp xxx
Pedagang & Masy. Pasar oleh Paguyuban Joko Tole	Rp xxx
Jasa Tabungan/Deposito	Rp xxx
Shodaqoh Instansi Vertikal/Polres	Rp xxx
Shodaqoh Perusahaan Swasta	Rp xxx
Kotak Jariah Jumat	Rp xxx
Kotak Tabungan Akherat	Rp xxx

Keterangan	Jumlah
Shodaqoh Jamaah Ad Dhuha	Rp xxx
Infaq Pendidikan TK Baiturrahman	Rp xxx
Infaq Pendidikan TPQ Baiturrahman	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Hajat	Rp xxx
Hasil Wakaf	Rp xxx
Jumlah Penerimaan Dana	Rp xxx
Penggunaan Dana:	
Pembangunan/Perbaikan Masjid	Rp xxx
Pph Giro/Tabungan	Rp xxx
Administrasi Bank	Rp xxx
Jasa Penggalian Dana	Rp xxx
Konsumsi	Rp xxx
Biaya fotocopy	Rp xxx
BBM Operasional/Pulsa	Rp xxx
Mualim, Karyawan, Madin	Rp xxx
Jasa Transportasi	Rp xxx
Bea Pos/Surat	Rp xxx
ATK	Rp xxx
Perlengkapan	Rp xxx
Operasional Pengajian Ad Dhuha	Rp xxx
Operasional Komputer & Alat-alat	Rp xxx
Biaya Listrik Air	Rp xxx
Biaya Administrasi	Rp xxx
Sumbangan & Sosial	Rp xxx
Informasi/Buletin/Banner	Rp xxx
Biaya Pemeliharaan/Kebersihan	Rp xxx
Operasional Pengajian Ba'da Shubuh	Rp xxx
Operasional Sholat Jumat	Rp xxx
Operasional Pengajian Hajat	Rp xxx
Radio & Operasional	Rp xxx
Jasa Pelatihan & Kependidikan	Rp xxx
Operasional RA Baiturrahman 1	Rp xxx
Operasional TPQ Baiturrahman	Rp xxx
Operasional RA Baiturrahman 2	Rp xxx
Surplus (Defisit)	Rp xxx

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal Tahun	Rp xxx
Saldo Akhir Tahun	Rp xxx

Laporan Arus Kas

Dalam Laporan Arus Kas kegiatan Masjid Agung Baiturrahman hanya terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi saja.

Laporan Arus Kas
Masjid Agung Baiturrahman
Per 31

Keterangan	Jumlah
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:	
Aktivitas Operasi	
Shodaqoh Masyarakat	Rp xxx
Pedagang & Masy. Pasar oleh Paguyuban Joko Tole	Rp xxx
Jasa Tabungan/Deposito	Rp xxx
Shodaqoh Instansi Vertikal/Polres	Rp xxx
Shodaqoh Perusahaan Swasta	Rp xxx
Kotak Jariyah Jumat	Rp xxx
Kotak Tabungan Akherat	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Ad Dhuha	Rp xxx
Infaq Pendidikan TK Baiturrahman	Rp xxx
Infaq Pendidikan TPQ Baiturrahman	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Hajat	Rp xxx
Hasil Wakaf	Rp xxx
Jumlah	Rp xxx
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	
Pembangunan/Perbaikan Masjid	(Rp xxx)
Jasa Penggalan Dana	(Rp xxx)
Konsumsi	(Rp xxx)
Biaya fotocopy	(Rp xxx)
BBM Operasional/Pulsa	(Rp xxx)

Keterangan	Jumlah
Mualim, Karyawan, Madin	(Rp xxx)
Jasa Transportasi	(Rp xxx)
Bea Pos/Surat	(Rp xxx)
ATK	(Rp xxx)
Perlengkapan	(Rp xxx)
Biaya Administrasi	(Rp xxx)
Sumbangan & Sosial	(Rp xxx)
Informasi/Buletin/Banner	(Rp xxx)
Radio & Operasional	(Rp xxx)
Jasa Kepelatihan & Kependidikan	(Rp xxx)
Operasional Pengajian Ad Dhuha	(Rp xxx)
Operasional Komputer & Alat-alat	(Rp xxx)
Biaya Listrik Air	(Rp xxx)
Biaya Pemeliharaan/Kebersihan	(Rp xxx)
Operasional Pengajian Ba'da Shubuh	(Rp xxx)
Operasional Sholat Jumat	(Rp xxx)
Operasional Pengajian Hajat	(Rp xxx)
Operasional RA Baiturrahman 1	(Rp xxx)
Operasional TPQ Baiturrahman	(Rp xxx)
Operasional RA Baiturrahman 2	(Rp xxx)
Pph Giro/Tabungan	(Rp xxx)
Administrasi Bank	(Rp xxx)
Jumlah	Rp xxx
Kenaikan atau Penurunan Kas	Rp xxx
Saldo Kas awal Periode	Rp xxx
Saldo Kas akhir Periode	Rp xxx

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Aset kelolaan ini memberikan manfaat jangka panjang. Karena Masjid Agung Baiturrahman tidak mempunyai Aset Kelolaan Maka tidak dibuatkan Laporan Aset Kelolaan.

Laporan Keuangan Masjid Agung Baiturrahman Berdasarkan PSAK 45

Dalam PSAK 45 dengan PSAK 109 yang membedakan hanya terletak pada aset saja. PSAK 45 untuk aset dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu Aset tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen.

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan
Masjid Agung Baiturrahman
Per 31

Keterangan	Jumlah
Aktiva:	
Bank	Rp xxx
Bangunan	Rp xxx
Inventaris	Rp xxx
Jumlah Aktiva	Rp xxx
Kewajiban dan Aktiva Bersih	
Utang Biaya:	
Biaya Banner Buletin	Rp xxx
Biaya Cetak Fotocopy	Rp xxx
Pembelian Barang Bangunan	Rp xxx
Jumlah Kewajiban	Rp xxx
Aktiva Bersih:	
Tidak Terikat:	
Shodaqoh Masyarakat	Rp xxx
Pedagang & Masy. Pasar oleh Paguyuban Joko Tole	Rp xxx
Shodaqoh Instansi Vertikal/Polres	Rp xxx
Shodaqoh Perusahaan Swasta	Rp xxx
Kotak Jariyah Jumat	Rp xxx
Kotak Tabungan Akherat	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Ad Dhuha	Rp xxx
Infaq Pendidikan TK Baiturrahman	Rp xxx
Infaq Pendidikan TPQ Baiturrahman	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Hajat	Rp xxx
Terikat Temporer:	

Keterangan	Jumlah
Terikat Permanen:	
Hasil Wakaf	Rp xxx
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	Rp xxx

Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas
Masjid Agung Baiturrahman
Per 31

Keterangan	Jumlah
Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat	
Pendapatan dan Penghasilan:	
Shodaqoh Masyarakat	Rp xxx
Pedagang & Masy. Pasar oleh Paguyuban Joko Tole	Rp xxx
Shodaqoh Instansi Vertikal/Polres	Rp xxx
Shodaqoh Perusahaan Swasta	Rp xxx
Kotak Jariah Jumat	Rp xxx
Kotak Tabungan Akherat	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Ad Dhuha	Rp xxx
Infaq Pendidikan TK Baiturrahman	Rp xxx
Infaq Pendidikan TPQ Baiturrahman	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Hajat	Rp xxx
Total Pendapatan yang tidak dibatasi	Rp xxx
Biaya-Biaya	
Perbaikan Masjid	Rp xxx
Pph Giro/Tabungan	Rp xxx
Administrasi Bank	Rp xxx
Jasa Penggalan Dana	Rp xxx
Konsumsi	Rp xxx
Biaya fotocopy	Rp xxx
BBM Operasional/Pulsa	Rp xxx
Mualim, Karyawan, Madin	Rp xxx
Jasa Transportasi	Rp xxx
Bea Pos/Surat	Rp xxx
ATK	Rp xxx

Keterangan	Jumlah
Perlengkapan	Rp xxx
Operasional Pengajian Ad Dhuha	Rp xxx
Operasional Komputer & Alat-alat	Rp xxx
Biaya Listrik Air	Rp xxx
Biaya Administrasi	Rp xxx
Sumbangan & Sosial	Rp xxx
Informasi/Buletin/Banner	Rp xxx
Biaya Pemeliharaan/Kebersihan	Rp xxx
Operasional Pengajian Ba'da Shubuh	Rp xxx
Operasional Sholat Jumat	Rp xxx
Operasional Pengajian Hajat	Rp xxx
Radio & Operasional	Rp xxx
Jasa Kepelatihan & Kependidikan	Rp xxx
Operasional RA Baiturrahman 1	Rp xxx
Operasional TPQ Baiturrahman	Rp xxx
Operasional RA Baiturrahman 2	Rp xxx
Jumlah Beban	Rp xxx
Penurunan atau kenaikan aktiva bersih tidak terikat	Rp xxx
Perubahan Aktiva Bersih Terikat temporer	
Biaya-Biaya	
Bisyaroh Karyawan Masjid	(Rp xxx)
Bisyaroh Imam dan Muadzin	(Rp xxx)
Bisyaroh Karyawan Perpustakaan	(Rp xxx)
Bisyaroh Karyawan PPOB	(Rp xxx)
Bisyaroh Karyawan Radio	(Rp xxx)
Bisyaroh TPQ Baiturrahman	(Rp xxx)
Bisyaroh RA Baiturrahman 1	(Rp xxx)
Bisyaroh RA Baiturrahman 2	(Rp xxx)
Bisyaroh Madrasah Diniyah	(Rp xxx)
Kenaikan atau Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer	Rp xxx
Perubahan dalam Aktiva Bersih Terikat Permanen	
Hasil Wakaf	Rp xxx
Kenaikan Aktiva Bersih Terikat Permanen	Rp xxx

Keterangan	Jumlah
Penurunan atau Kenaikan Aktiva Bersih	Rp xxx
Aktiva Bersih pada Awal Tahun	Rp xxx
Aktiva Bersih pada Akhir Tahun	Rp xxx

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas
Masjid Agung Baiturrahman
Per 31

Keterangan	Jumlah
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:	
Aktivitas Operasi	
Shodaqoh Masyarakat	Rp xxx
Pedagang & Masy. Pasar oleh Paguyuban Joko Tole	Rp xxx
Jasa Tabungan/Deposito	Rp xxx
Shodaqoh Instansi Vertikal/Polres	Rp xxx
Shodaqoh Perusahaan Swasta	Rp xxx
Kotak Jariyah Jumat	Rp xxx
Kotak Tabungan Akherat	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Ad Dhuha	Rp xxx
Infaq Pendidikan TK Baiturrahman	Rp xxx
Infaq Pendidikan TPQ Baiturrahman	Rp xxx
Shodaqoh Jamaah Hajat	Rp xxx
Hasil Wakaf	Rp xxx
Jumlah	Rp xxx
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	
Perbaikan Masjid	(Rp xxx)
Jasa Penggalian Dana	(Rp xxx)
Konsumsi	(Rp xxx)
Biaya fotocopy	(Rp xxx)
BBM Operasional/Pulsa	(Rp xxx)
Mualim, Karyawan, Madin	(Rp xxx)
Jasa Transportasi	(Rp xxx)
Bea Pos/Surat	(Rp xxx)

Keterangan	Jumlah
ATK	(Rp xxx)
Perlengkapan	(Rp xxx)
Biaya Administrasi	(Rp xxx)
Sumbangan & Sosial	(Rp xxx)
Informasi/Buletin/Banner	(Rp xxx)
Radio & Operasional	(Rp xxx)
Jasa Kepelatihan & Kependidikan	(Rp xxx)
Operasional Pengajian Ad Dhuha	(Rp xxx)
Operasional Komputer & Alat-alat	(Rp xxx)
Biaya Listrik Air	(Rp xxx)
Biaya Pemeliharaan/Kebersihan	(Rp xxx)
Operasional Pengajian Ba'da Shubuh	(Rp xxx)
Operasional Sholat Jumat	(Rp xxx)
Operasional Pengajian Hajat	(Rp xxx)
Operasional RA Baiturrahman 1	(Rp xxx)
Operasional TPQ Baiturrahman	(Rp xxx)
Operasional RA Baiturrahman 2	(Rp xxx)
Pph Giro/Tabungan	(Rp xxx)
Administrasi Bank	(Rp xxx)
Jumlah	Rp xxx
Kenaikan atau Penurunan Kas	Rp xxx
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	Rp xxx
Kas dan Setara Kas pada Akhir tahun	Rp xxx